

# ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN SOSIAL : STRATEGI MENUJU PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA RAKYAT (PEOPLE CENTRED DEVELOPMENT)

Harry Hikmat

Pemahaman terhadap pembangunan menghasilkan ide kemajuan, berkonotasi ke depan atau ke tingkat yang lebih tinggi. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1994 : 90).

Pembangunan juga telah didefinisikan sebagai pertumbuhan plus perubahan, yang merupakan kombinasi berbagai proses ekonomi, sosial dan politik, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (United Nations, 1972). Selain pengertian tersebut, Surna (1992) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia.

Pada hakekatnya ada tiga domain dalam pembangunan, yaitu : *domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi*. Himpunan bagian yang saling beririsan antara domain tersebut menghasilkan tiga paradigma pembangunan, yaitu:

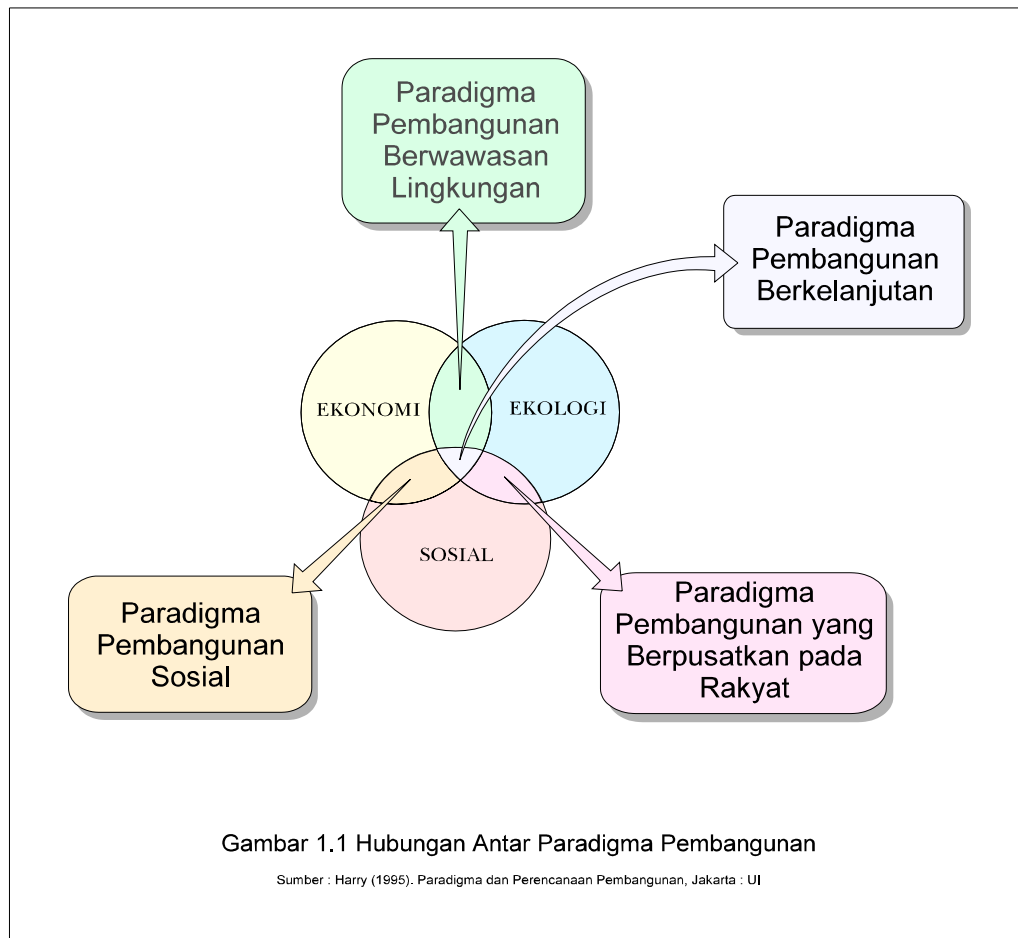
- (1) pembangunan sosial (*social development*);
- (2) pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*);
- (3) pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (*people centered development*).

Integrasi antara ketiga himpunan bagian disebut paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hubungan antara paradigma pembangunan disajikan pada Gambar 1. Selanjutnya perbedaan yang mendasar antara paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan yang berpusatkan pada rakyat, pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan dapat dilihat pada tabel 1 di halaman berikutnya.

## Model pembangunan berpusat pada rakyat

Pemahaman tentang paradigma pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (*People Centered Development*), diawali dengan pemahaman tentang *Ekologi Manusia*, yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Ekologi manusia dalam ekosistem merupakan salah satu kajian dari Ekologi. Soerjani (1992 :12) menyatakan bahwa ekosistem dikaji oleh Ekologi, sedangkan lingkungan hidup dikaji oleh Ilmu Lingkungan yang landasan pokoknya adalah Ekologi, serta dengan memperhatikan disiplin lain, terutama Ekonomi dan Sosiologi. Ekologi Manusia menjadi landasan berkembangnya paradigma pembangunan yang berpusatkan pada rakyat. Adapun landasan Ilmu Lingkungan adalah Ekologi, maka Ilmu Lingkungan dapat disebut sebagai Ekologi *Terapan (Applied Ecology)* yakni penerapan prinsip dan konsep Ekologi dalam

kehidupan manusia. Perspektif Ilmu Lingkungan dalam paradigma pembangunan dikenal sebagai Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan (*Environmental Development*), yang akan diuraikan pada pokok bahasan selanjutnya



Lebih lanjut Soerjani mengatakan bahwa Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal-balik makhluk hidup (*biotik*) sesamanya dan dengan benda-benda non-hidup (*abiotik*) di sekitarnya. Jadi Ekologi adalah juga ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup dan lingkungannya. Sebagai bagian dari makhluk hidup, peranan dan perilaku manusia dipelajari secara khusus dalam Ekologi Manusia, sehingga Ekologi Manusia berarti Ekologi yang memusatkan pengkajian pada manusia sebagai individu maupun sebagai populasi dalam suatu ekosistem. Ekologi dan Ekonomi adalah dua hal yang berakar kata yang sama : *oikos* (rumah tangga), yang satu tentang rumah tangga, yang kedua tentang pengelolaan rumah tangga. Antara kedua pandangan tersebut tidak jarang keduanya berbenturan satu sama lain. Seolah-olah keduanya berada dalam dua jaringan atau sistem yang berbeda. Padahal sebenarnya rumah tangga manusia itu juga merupakan bagian, atau harus berada secara serasi dan didukung secara kesinambungan (*sustainable*) dalam dan oleh rumah tangga makhluk hidup di lingkungannya. Benturan tersebut terjadi berakar dari pengaturan tata-ruang dalam ekosistem. (Soerjani, 1992 :12)

Pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah

kemiskinan, kelompok rentan dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negatif, seperti longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Karena itu, komitmen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil dan tanpa mengecualikan rakyat miskin, meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari hak azasi, nondiskriminasi dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung; merupakan hakekat dari paradigma pembangunan berpusat pada rakyat.

Strategi pembangunan berpusat pada rakyat memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu dan kolektif, dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sedang berlaku. Tujuan objektif dalam strategi pembangunan berpusat pada rakyat pada intinya memberantas kemiskinan absolut, realisasi keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata. Prioritas awal diperuntukkan pada daerah yang tidak menguntungkan dan kelompok-kelompok sosial yang rawan terpengaruh, termasuk wanita, anak-anak, generasi muda yang tidak mampu, lanjut usia, dan kelompok-kelompok marginal lainnya.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka berkembang pendekatan yang berpusat pada rakyat. Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sebenarnya merupakan antitesis dari model pembangunan yang berorientasi pada produksi. Untuk model pembangunan yang berorientasi pada produksi ini, termasuk didalamnya model-model pembangunan ekonomi yang memosisikan pemenuhan kebutuhan sistem produksi lebih utama daripada kebutuhan rakyat.

Secara sederhana, Korten (1993) menyatakan bahwa pembangunan yang berpusat pada produksi lebih memusatkan perhatian pada :

1. Industri dan bukan pertanian, padahal mayoritas penduduk dunia memperoleh mata pencaharian mereka dari pertanian;
2. Daerah perkotaan dan bukan daerah pedesaan ;
3. Pemilikan aset produktif yang terpusat, dan bukan aset produktif yang luas;
4. Investasi-investasi pembangunan lebih menguntungkan kelompok yang sedikit dan bukannya yang banyak ;
5. Penggunaan modal yang optimal dan bukan penggunaan sumber daya manusia yang optimal, sehingga sumber daya modal dimanfaatkan sedangkan sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal;
6. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk mencapai peningkatan kekayaan fisik jangka pendek tanpa pengelolaan untuk menopang dan memperbesar hasil-hasil sumber daya, dengan menimbulkan kehancuran lingkungan dan penguasaan basis sumber daya alami secara cepat;
7. Efisiensi satuan-satuan produksi skala besar yang saling tergantung dan didasarkan pada perbedaan keuntungan internasional, dengan meninggalkan keanekaragaman dan daya adaptasi dari satuan-satuan skala kecil yang diorganisasi guna mencapai swadaya lokal, sehingga menghasilkan perekonomian yang tidak efisien dalam hal energi; kurang daya adaptasi dan mudah mengalami gangguan yang serius karena kerusakan atau manipulasi politik dalam suatu bagian sistem tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, model pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan suatu alternatif baru untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan guna memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah, akan tetapi peningkatan itu harus dicapai dengan cara-cara yang sesuai dengan asas-asas dasar partisipasi dan keadilan dan hasil-hasil itu harus dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia di dunia ini.

Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan kepada pemberdayaan, yaitu menekankan kenyataan pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan dan posisinya dalam tata ekonomi internasional. Karena itu pendekatan ini berpendapat bahwa masyarakat harus menggugat struktur dan situasi keterbelakangan secara simultan dalam berbagai tahapan.

Korten (1993) menyatakan konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Selanjutnya Korten mengemukakan tiga tema penting yang dianggap menentukan bagi konsep perencanaan yang berpusat pada rakyat, yaitu :

1. Penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri;
2. Kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagai besar rumah tangga miskin;
3. Kebutuhan akan kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Manusia dan lingkungan merupakan variabel endogen yang utama, yaitu sebagai titik tolak bagi perencanaan pembangunan, sehingga perspektif dasar dan metode analisis dalam pendekatan pembangunan ini yaitu Ekologi Manusia - yaitu kajian mengenai interaksi antara sistem manusia dan ekosistem. Pendekatan ini juga mempersoalkan dua asumsi yang terkandung dalam model-model pembangunan ekonomi; *pertama*, bahwa pembangunan dengan sendirinya membantu setiap orang, dan *kedua*, bahwa masyarakat ingin diintegrasikan dalam arus utama suatu pembangunan model barat, dimana mereka tidak punya pilihan untuk merumuskan jenis masyarakat yang mereka inginkan.

Dengan menggunakan waktu sebagai ukuran dasar perubahan, dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat dibedakan antara strategi jangka panjang dengan strategi jangka pendek. Strategi jangka panjang diperlukan untuk menghancurkan struktur ketimpangan sosial, kelas dan bangsa. Prasarat dasar bagi proses ini termasuk pembebasan nasional dari dominasi kolonialisme dan neokolonialisme, pergeseran dari strategi pertanian yang berorientasi ekspor, dan kontrol yang lebih besar terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan-perusahaan multinasional. Strategi jangka pendek didefinisikan sebagai kebutuhan untuk menemukan cara-cara menghadapi krisis-krisis yang sedang berlangsung, dengan membantu masyarakat dalam produksi pangan melalui peningkatan diversifikasi pertanian, sebagaimana juga kesempatan kerja di sektor formal dan informal.

Tabel 2. Perbandingan paradigma pembangunan yang berorientasi pada produksi dengan yang berpusat pada rakyat

Dimensi-dimensi	Pembangunan berpusatkan pada produksi	Pembangunan berpusatkan pada rakyat
Logika	Ekonomi-Produksi : eksploitasi dan manipulasi sumber daya alam	Ekologi Manusia : Pemanfaatan sumber daya informasi dan prakarsa kreatif
Tujuan	Maksimalisasi arus barang dan jasa	Peningkatan potensi manusiawi (individu sebagai aktor). Pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal
Sistem ekonomi	Konvensional : - skala besar - spesialisasi - investasi - keunggulan komparatif - interdependensi global	Swadaya : - logika tempat - rakyat - sumber daya (sistem ekologi manusia)
Brokrasi	Birokrasi besar : masyarakat diorganisasikan dalam satuan produksi yang efisien dengan pengawasan terpusat	Sistem swa-organisasi yang ada di sekitar satuan-satuan organisasi manusia dan berskala komunitas
Kriteria	Efisiensi Maksimalisasi laju kenaikan produktivitas sistem	Nilai Produk Partisipasi Mutu kehidupan kerja
Teknik Sosial	- Bentuk organisasi sistem komando - Metode analisis keputusan "bebas nilai" dan positivistik - Pengetahuan dikembangkan berdasarkan perspektif fungsional - Sistem produksi didefinisikan secara fungsional - Perangkat analisis tidak mempertimbangkan manusia dan lingkungan	- Bentuk organisasi swadaya - peran individu dalam proses pembuatan keputusan, dengan "nilai manusiawi" sebagai ukuran - Pengetahuan dikembangkan berdasarkan perspektif teritorial - Pilihan-pilihan produksi dan prestasi didasarkan pada kerangka ekologi, yaitu melibatkan manusia dan menempatkan manusia sebagai proses analisis
Proses pembuatan keputusan	- sentralisasi - didominasi para ahli - tidak konsultatif - kendali pejabat yang tidak menanggung akibat keputusan	- memberi rakyat kapasitas hak memasukkan nilai-nilai kebutuhan lokal dalam proses pembuatan keputusan - kendali pada rakyat yang hidupnya dipengaruhi oleh keputusan itu
Teknologi organisasi	- diarahkan pada kebutuhan sistem komando - menekankan aturan main hukum - wewenang pengawasan pada struktur formal	- sistem belajar swa-organisasi - struktur formal itu dilengkapi dengan berbagai teknologi organisasi yang kurang formal dan cepat adaptasi diri - Jaringan informasi yang dibangun di sekeliling arus manusia, nilai dan informasi sebagai tanggapan terhadap kepentingan dan kebutuhan khusus sesuai dengan keadaan - kelompok-kelompok sosial yang lebih permanen, seperti keluarga, RT, organisasi sukarela, dsb.

Sumber : Korten, 1987. *Community Management*. West Hartford: Kumarian.

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menggugat subordinasi mereka melalui organisasi-organisasi lokal secara *bottom-up*. Organisasi yang dianggap paling efektif adalah organisasi yang bermula dengan kebutuhan praktis masyarakat yang konkrit yang berkaitan dengan persoalan kesehatan, ketenagakerjaan dan penyediaan pelayanan

dasar, tetapi yang dapat memanfaatkan isu-isu tersebut sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan strategis masyarakat dalam suatu konteks sosial politik tertentu.

Dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat mengidentifikasi kebutuhan praktis dan strategis melalui pemberdayaan atau penguatan diri masyarakat. Oleh karena itu penting melakukan kategorisasi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat untuk menghindari waktu sebagai determinan perubahan, karena perubahan jangka pendek belum menjamin transformasi jangka panjang, dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat tidak secara otomatis berarti terpenuhinya kebutuhan strategis masyarakat.

Kebutuhan praktis yang dimaksud yaitu berbagai kebutuhan dasar manusia. Sementara itu, kebutuhan strategis mencakup kemampuan dasar untuk mengakses fasilitas pelayanan sosial dan pemenuhan hak-hak individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Usaha untuk memenuhi kebutuhan strategis tersebut adalah arena pekerjaan sosial yang selama ini diyakini sebagai suatu profesi yang memiliki kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat.

Zaman baru yang dibayangkan melalui pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat mensyaratkan pula transformasi struktur-struktur yang mensubordinasi dalam ekologi manusia, yang telah demikian menindas masyarakat.

Perubahan hukum, aturan kemasyarakatan, sistem hak milik dan kontrol atas masyarakat, aturan perburuhan, institusi sosial dan legal yang melindungi kontrol sosial masyarakat merupakan hal yang sangat penting jika masyarakat ingin memperoleh keadilan dalam suatu tatanan sosial politik tertentu.

Dalam cara mencapai kebutuhan-kebutuhan itulah, pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat melalui strategi pemberdayaan secara mendasar sangat berbeda dengan pendekatan-pendekatan pembangunan yang lain. Pendekatan ini berupaya untuk mencapai kebutuhan strategis masyarakat secara tidak langsung melalui kebutuhan praktis masyarakat, dengan menghindari konfrontasi secara langsung dengan membangun kebutuhan praktis masyarakat sebagai basis untuk membangun landasan yang kuat, sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan strategis.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya dan politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa agar esensi pemberdayaan tidak menjadi terdistorsi.

Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Hal ini membutuhkan kajian strategis tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezzo dan makro; sehingga masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa adanya hambatan eksternal pada struktur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional setingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi; sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat atau nasional. Pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas ke bawah daripada dari bawah ke atas.

Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah, dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, pemungkin, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung dan peran-peran lain yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Adapun peran organisasi lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lain lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi sedemikian, maka permasalahan sosial ditangani oleh masyarakat atas fasilitasi dari pemerintah.

### ***Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan***

#### ***(Environmental Development)***

Lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan mulai dikenal di kalangan pemerintah di dunia ini pada tahun 1972, dan sejak itu mulai dirintis berbagai langkah mengembangkan pola pembangunan yang tidak merusak lingkungan (Emil, 1990). Konferensi PBB untuk lingkungan hidup Juni 1972 di Stockholm, Swedia, merupakan titik awal berkembangnya paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan. Indonesia baru secara eksplisit memuatkan pertimbangan lingkungan dalam pembangunan sejak Repelita II (1979-1983). Dan sejak itu diusahakan berbagai alat kebijakan pembangunan yang mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif pembangunan terhadap lingkungan.

Dalam buku "Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 1992 : 20 tahun Setelah Stockholm" , yang disunting oleh Surna dan Harry (1992:7-9) diuraikan tentang perkembangan paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan (*environmental development*). Konferensi Stockholm dengan slogannya ***Hanya Satu Bumi***, ingin mencoba membangkitkan perhatian negara-negara di dunia akan permasalahan lingkungan serta mencoba mengidentifikasi aspek-aspek yang sebaiknya dipecahkan melalui kerjasama dan perjanjian internasional. Dari 109 rekomendasi yang dihasilkan konferensi Stockholm, kesemuanya itu dapat dikelompokkan dalam lima bidang utama : permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan. Deklarasi Stockholm yang telah disepakati PBB mencatat perlunya komitmen, pandangan dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia. Salah satu kunci keberhasilan Konferensi adalah terbentuknya Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) pada tahun 1972, suatu badan PBB yang mengkoordinasikan kegiatan lingkungan internasional.

Konsep lingkungan manusia yang diperkenalkan UNEP adalah konsep yang teramat penting. Berbeda dengan karakteristik lingkungan alam, konsep lingkungan ini lebih sesuai dengan bagi negara berkembang. Konsep ini menekankan perlunya langkah-

langkah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan yang diderita sebagian besar umat manusia di negara berkembang. Slogan *Hanya Satu Bumi* juga menekankan pentingnya keterkaitan antara makhluk di muka bumi.

Pada konferensi Stockholm ini pulalah mulai diupayakan melibatkan pemerintah di seluruh dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang bagi penyelamatan planet bumi, menggagalkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan prioritas dan prinsip-prinsip lingkungan. Selain itu, dipromosikan juga perjanjian dan konferensi internasional yang selanjutnya perlu diadakan, untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang pertama kali diangkat di Stockholm.

Berkaitan dengan semua masalah itu, tidaklah mengherankan jika konferensi ini mengkaji kembali pola pembangunan konvensional yang merusak bumi, yang erat kaitannya dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan demografi di negara berkembang, pola konsumsi yang berlebihan di negara maju, serta timpangnya tatanan ekonomi internasional.

Sepuluh tahun setelah Stockholm, 105 negara menghadiri konferensi di Nairobi, Kenya. Konferensi ini merupakan perwujudan dari semakin meningkatnya kesadaran lingkungan global dan semakin diakui pentingnya pembangunan ekonomi. Beberapa isu yang menjadi pusat perhatian pada konferensi tersebut dan sekarang masih tetap relevan adalah : (1) masalah atmosfer, seperti menurunnya kualitas udara di permukiman kota; (2) pencemaran lautan oleh minyak bumi dan substansi lainnya; (3) pencemaran air permukaan dan air tanah; dan (4) degradasi biota daratan dan tata lingkungan biologis.

Perlunya pengelolaan lingkungan dan analisis dampak lingkungan serta pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan juga merupakan pokok bahasan penting pada Deklarasi Nairobi.

Sebagai peringatan ulang tahun ke-duapuluh Konferensi Stockholm yang jatuh pada tahun 1992, telah berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil. Konferensi ini secara formal disebut Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan PBB (UNCED) atau lebih dikenal sebagai KTT Bumi ini, digagas pertama kalinya oleh Komisi Brundtland pada tahun 1987.

Maurice Strong, Sekretaris Jenderal Konferensi Stockholm dan sekarang Ketua KTT Bumi membedakan antara Konferensi Stockholm tahun 1972 dan KTT Bumi ini. Tujuan mendasar Konferensi Stockholm tahun 1972 adalah untuk memasukkan isu lingkungan dalam agenda internasional. Sedangkan tujuan utama Konferensi Rio tahun 1992 lebih ditekankan pada pengintegrasian lingkungan ke dalam agenda pembangunan, disamping perlunya aspek lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembangunan ekonomi.

UNCED bermaksud untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi sampai akhir abad ini dan sesudahnya. Secara komprehensif juga terkait dengan isu pembangunan, yaitu laju pertumbuhan penduduk bumi yang meningkat dengan cepat. Pada tahun 1972

penduduk bumi baru 4 milyar jiwa, sekarang lebih dari 5 milyar jiwa dan diperkirakan melampaui 6 milyar jiwa pada tahun 2000 dan 10 milyar jiwa di tahun 2050.

UNCED, yang diikuti 180 negara, membahas kebutuhan manusia akan lingkungan hidup yang serasi, lestari, sehat dan produktif. Ini menyangkut isu mengenai perubahan iklim, penipisan lapisan ozon dan pencemaran udara. Selain itu dibahas pula perlindungan terhadap tanah yang berkaitan dengan penggundulan hutan, penggurunan dan hilangnya lapisan tanah yang subur, pelestarian keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran air, perlindungan terhadap pesisir dan lautan, bioteknologi, pencegahan lintas batas ilegal dari limbah berbahaya dan beracun, peningkatan kualitas hidup dan kesehatan manusia. Berbagai hasil yang diharapkan adalah disepakatinya Konvensi Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati.

Hasil penting lainnya adalah *Deklarasi Rio* atau *Piagam Bumi*, yang memuat sejumlah prinsip mengenai hak dan tanggungjawab negara terhadap lingkungan. Semuanya ini menjadi relevan dengan isi Agenda 21, suatu dokumen cetak biru yang memuat rincian rencana tindakan yang perlu diikuti pemerintah, organisasi internasional dan berbagai pihak lain. Secara ringkas, Agenda 21 ditujukan untuk melindungi lingkungan serta merekonsiliasikan pembangunan dan lingkungannya, mulai sekarang sampai abad ke-21 mendatang.

Hal utama yang diperlukan dalam pembangunan berwawasan lingkungan adalah penggunaan sumber daya berkesinambungan, serta bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat. Pembangunan dapat menghasilkan **dampak negatif** selain **dampak positif**. Berbagai fakta dan pengalaman menunjukkan bahwa dampak negatif pembangunan menyebabkan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terlambat atau tidak tercapai. Dalam penyusunan kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, pertimbangan lingkungan menjadi sub sistem yang dimasukkan dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Asumsinya, jika pembangunan tidak memperhatikan kualitas lingkungan hidup, maka depresiasi sumber daya alam akan semakin nyata. Oleh karena itu keseimbangan antara lingkungan hidup sosial, lingkungan hidup binaan dan lingkungan hidup alami perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris dan objektif dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan (Surna, 1992).

Untuk kondisi di Indonesia, Emil (1990:2) menyatakan bahwa segi-segi lingkungan umumnya belum masuk alur tengah pemikiran ekonomi. Segi-segi lingkungan diperlakukan sebagai faktor ekstern, yang proses internalisasinya belum berjalan secara otomatis dalam proses ekonomi. Karena itu maka proses pembangunan yang sarat pertimbangan ekonomi akan terasa timpang dan memerlukan pemikiran-ulang untuk bisa mencegah dampak negatifnya kepada lingkungan. Salah satu cara agar aspek lingkungan terintegrasi dalam pembangunan ekonomi, yaitu melalui perhitungan ekonomi sumber daya alam atau *natural resources accounting*.

Perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan memperhatikan faktor-faktor seperti perubahan demografi, kebutuhan penduduk, keterbatasan sumber daya, pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterkaitan dan interaksinya satu sama lain. Hal ini memungkinkan untuk dapat merumuskan berbagai kebijaksanaan seperti :

1. Pengelolaan sumber daya alam;
2. Analisis dampak lingkungan;
3. Penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;
4. Pengembangan keanekaragaman hayati;
5. Pengendalian kerusakan lingkungan;
6. Pengembangan kebijakan ekonomi lingkungan;
7. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
8. Pengembangan hukum lingkungan. (Surna, 1992)

Pertambahan penduduk yang besar akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya masalah antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia harus mengelola dan mengawasi lingkungannya sebaik mungkin, sehingga pembangunan berwawasan lingkungan dapat menunjang kehidupan dan pertumbuhannya. Selanjutnya faktor kualitas penduduk akan mempengaruhi faktor lingkungan, dan sebaliknya faktor lingkungan akan mempengaruhi faktor kualitas penduduk atau istilah lain *interlocking*.

Dalam tulisan Riga Adiwoso (1990) tentang “*Analisis Dampak Sosial : Memperkirakan dan Mencegah Dampak Pembangunan terhadap Lingkungan Sosial*”, dijelaskan bahwa pada tahun 1970-an berkembanglah Social Impact Assessment (SIA) di Amerika yang merupakan hasil perhatian ilmuwan dan praktisi untuk memahami dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan industri dan eksplorasi sumber daya alam. Perhatian ini berkembang karena adanya ketergantungan yang berlebihan pada kriteria-kriteria ekonomi dalam mengukur konsep yang dikenal sebagai “*kualitas manusia*”. Hasil nyata dari reaksi terhadap “*economic philitinism*” adalah gerakan indikator sosial dan gerakan ekologi. Kedua gerakan ini berangkat dari asumsi bahwa perspektif ekonomi yang berlebihan terhadap perubahan teknologi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi mengesampingkan faktor sosial dan lingkungan yang penting dan juga kurang memperhatikan dampak terhadap manusianya.

Perubahan yang pesat dalam pembangunan industri menimbulkan berkembangnya masyarakat yang semakin kompleks. Perubahan sosial dirasakan di semua kegiatan kehidupan, baik sebagai dampak positif maupun negatif. Dampak dari orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan industri sebagai basis pertumbuhan ekonomi, semakin dirasakan dampak negatif terhadap lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Hal ini seiring dengan dampak negatif terhadap pergeseran dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, sehingga diperlukan usaha untuk “*pencarian kembali nilai*” dan menekankan usaha mencari “*keadilan sosial*” dan “*kualitas hidup*” serta “*pemerataan*”. Kesemua ini mendorong perencanaan pembangunan untuk tidak memisahkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam proses kebijakan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Misalnya, di Amerika, desakan dari gerakan ekologi menghasilkan “*National Environmental Policy Act (NEPA)*” tahun 1969 yang menekankan pada analisis dampak pembangunan terhadap *lingkungan biogeofisik*.

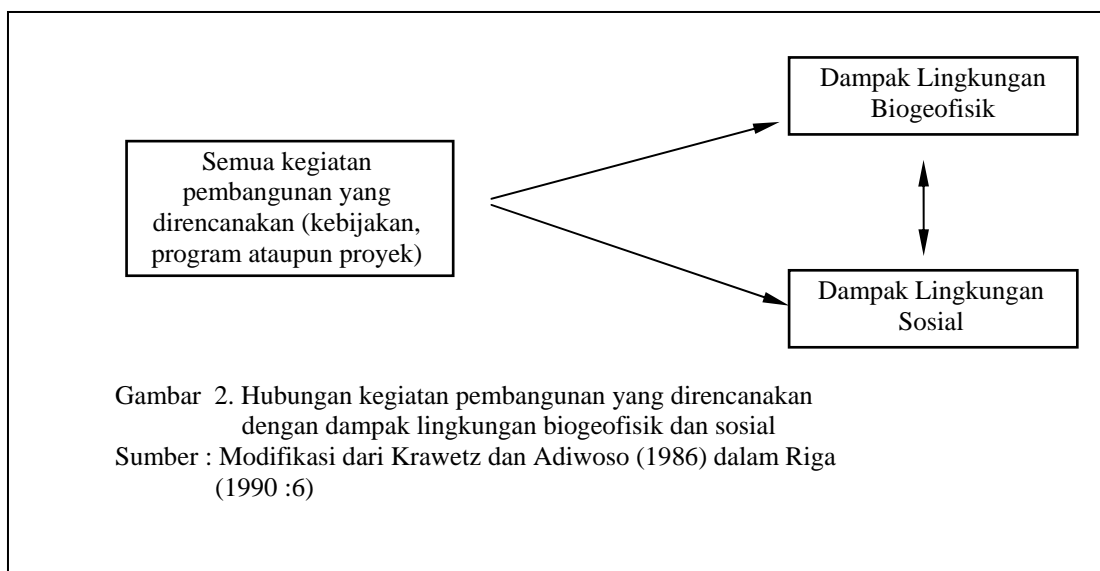
Dalam memberikan perspektif yang komprehensif, analisis lingkungan biogeofisik dari pembangunan, mencoba memperluas batasannya dengan memasukkan aspek sosio ekonomi ke dalamnya, namun terjadi kepincangan karena ilmuwan biogeofisik yang

tertarik pada aspek sosial kurang berhasil dalam mengembangkan pengetahuan ilmu-ilmu sosial ke dalam proses analisis dampak lingkungan (EIA). Hal ini telah mendorong ilmuwan untuk mengembangkan “*Social Impact Assessment*” yang menekankan pemisahan aspek sosial, demografi maupun ekonomi dari aspek biogeofisik agar dapat memberikan perhatian yang sepadan. Dalam konteks ini maka paradigma Pembangunan Berpusat pada Rakyat relevan untuk dijadikan landasan analisis dampak lingkungan sosial (Social Impact Assessment).

Walaupun EIA dan SIA lahir atas dasar reaksi terhadap keadaan yang sama dan seringkali menilai obyek yang sama namun dalam perkembangannya makin terlihat sebagai kegiatan yang berbeda. Perbedaan nyata ialah dalam permasalahan yang dihadapi, ragam disiplin yang melakukan, dan perangkat yang digunakan. Misalnya, dalam membangun jalan raya dapat dilakukan studi dampak yang menilai apakah pembangunan akan menyebabkan kebisingan ataupun polusi (dampak biogeofisik). Dinilai juga apakah akan menyebabkan stress psikologis serta relokasi (dampak sosial) dan apakah akan meningkatkan/ menurunkan harga tanah (dampak ekonomi).

Permasalahan utama yang hingga kini dibahas di dunia internasional dan belum didapat pemecahannya yang mantap, ialah bagaimana mengintegrasikan data mengenai dampak sosial, ekonomi dan biogeofisik dalam proses pengambilan keputusan. Di pihak lain, subyek penelitian biogeofisik dan sosial berbeda, perangkat analisis dampak sosial tidak dapat dilaksanakan dengan perangkat yang berlaku bagi analisis dampak lingkungan biogeofisik. Juga, analisis dampak sosial tidak perlu selalu dilihat sebagai subset dari kegiatan analisis dampak lingkungan, tetapi sebagai analisis bagi kegiatan pembangunan secara umum (Riga, 1990 :3).

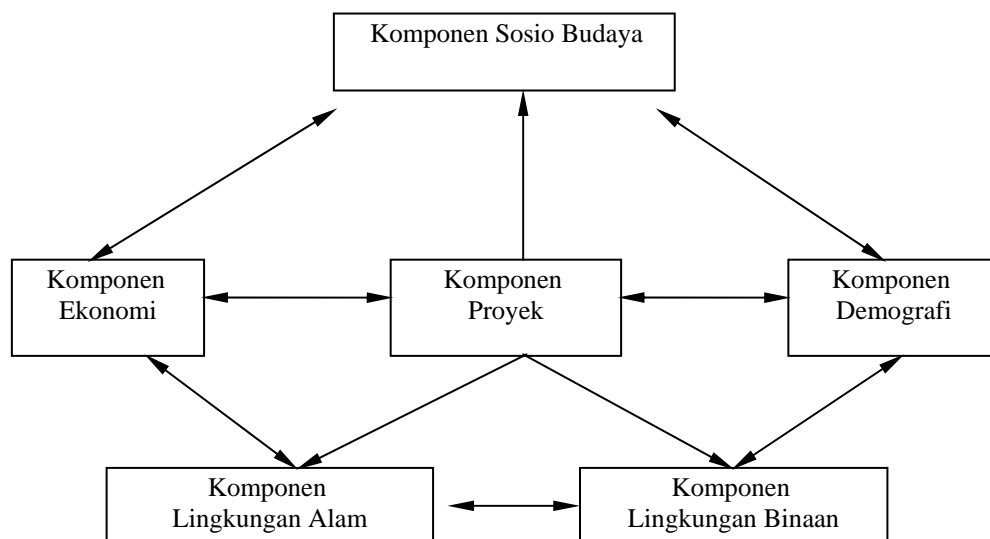
Tujuan utama dari Analisis Dampak Lingkungan Sosial ialah menyajikan informasi mengenai dampak sosial pembangunan sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Informasi yang diberikan untuk menangani berbagai konsekuensi suatu kegiatan pembangunan, tetapi juga berbagai alternatif yang dapat diambil dalam pelaksanaan program ataupun proyek agar dapat dampak negatifnya dikurangi. Andal Sosial dapat berarti juga sebagai studi dampak dan konsekuensi sosial dari kegiatan perubahan yang direncanakan, baik perubahan biogeofisik, sosial ataupun ekonomi. Dampak lingkungan sosial dan dampak lingkungan biogeofisik dapat dilihat sebagai dampak langsung dari kegiatan pembangunan, dan antara dampak lingkungan biogeofisik dengan dampak lingkungan sosial saling berkaitan (berkorelasi).



Permasalahan lain yang dihadapi dalam menentukan ruang lingkup analisis dampak lingkungan sosial, ialah bagaimana hubungan antara berbagai aspek yang terkait dalam kegiatan pembangunan, baik dalam tingkat konseptual maupun operasional. Riga (1990 :10) telah mengidentifikasi suatu kerangka pemikiran yang melihat hubungan antara aspek-aspek yang terkait dalam pembangunan, yang berasal dari gerakan indikator sosial dan berdasarkan konsep kualitas hidup (quality of life) dan kemaslahatan sosial (well being). Ada 6 aspek utama dalam Andal Sosial, yaitu :

- (1) Aspek Sosio Budaya;
- (2) Aspek Demografi;
- (3) Aspek Ekonomi;
- (4) Aspek Lingkungan Binaan;
- (5) Aspek Lingkungan Alam;
- (6) Aspek Proyek.

Hubungan antar aspek tersebut digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3. Hubungan antar komponen dalam Andal Sosial**

Dari 6 aspek/ komponen yang berkaitan, dalam Andal sosial, komponen intinya adalah 3 komponen, yaitu sosio budaya, demografi, dan ekonomi. Untuk dampak sosial dilihat hubungan intra-komponen inti dan hubungan inter komponen inti dengan komponen proyek, lingkungan alam dan lingkungan binaan, Dengan demikian, suatu Andal Sosial baru dianggap lengkap, bila dapat menyajikan informasi mengenai dampak yang diperkirakan yang menyangkut komponen inti tersebut. Informasi mengenai subkomponen tidak hanya yang bersifat statistik. Analisis kualitatif diperlukan dengan mengidentifikasi : pertama, kesempatan dan masalah sosial yang mungkin terjadi sebagai akibat suatu kegiatan pembangunan, kebijakan, program ataupun proyek, dan kedua, informasi tentang masyarakat mana yang akan terkena dampak.

Riga (1990) mengidentifikasi subkomponen yang dianggap perlu dipertimbangkan dalam Andal Sosial dengan mengacu kepada faktor-faktor yang diusulkan pada temu kaji Andal Sosial di Kantor Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (sekarang Kantor Menteri Lingkungan Hidup) tahun 1986, sebagai berikut :

### **1. Komponen Sosio-Budaya :**

- a. Organisasi budaya dan cara hidup sehari-hari yang menyangkut jenis pranata yang ada dalam suatu komunitas, adat-istiadat, norma dan tata-cara, dan pengelompokan masyarakat. Dilihat juga pola interaksi antar-subkomponen.
- b. Nilai, sikap dan persepsi : baik antar-kelompok maupun mengenai kegiatan yang direncanakan.
- c. Distribusi kekuasaan dan kehidupan politik : pembagian kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu serta pergeseran kekuasaan dalam masyarakat.
- d. Struktur stratifikasi : berbagai stratifikasi menurut berbagai pranata yang ada, misalnya struktur stratifikasi sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan agama dalam suatu masyarakat.
- e. Peranan dalam masyarakat, yang menyangkut juga masalah kesempatan peranan dan tingkat spesialisasi yang ada dan diperlukan.
- f. Integrasi atau keserasian : melihat proses sosial yang dapat memelihara, mencegah atau merusak keserasian.
- g. Hubungan dengan daerah, atau lokasi lainnya : keterkaitan yang ada antara masyarakat, dimana kegiatan pembangunan akan diadakan, dengan masyarakat di luar lokasi tersebut, baik hubungan yang bersifat sosial, politik maupun ekonomi.
- h. Pranata dan fungsinya dalam masyarakat yang erat hubungannya dengan subkomponen organisasi budaya dan cara hidup sehari-hari. Dilihat jenis dan jaringan hubungan dalam setiap pranata.
- i. Pengalaman dengan perubahan sosial : tingkat kesanggupan masyarakat menangani perubahan yang datang dari luar serta cara-cara penanganan perubahan.
- j. Masalah Sosial : jenis-jenis masalah sosial yang ada serta penanganannya di masyarakat.
- k. Kesehatan lingkungan yang dipengaruhi oleh ciri kependudukan, cara hidup, penggunaan sumber daya, keadaan biofisik serta risiko suatu proyek.
- l. Penggunaan sumber daya (produksi-distribusi-pola konsumsi). Teknologi yang digunakan dalam suatu kegiatan pembangunan dapat merubah pola konsumsi setempat yang selanjutnya merubah cara hidup sehari-hari maupun penggunaan lahan/tanah.
- m. Lingkungan binaan : perubahan pada lingkungan binaan akan membawa dampak perubahan persepsi, orientasi, rasa kenyamanan, dan interaksi sosial.
- n. Demografi : peningkatan mobilitas penduduk yang dapat memberi dampak perubahan terhadap struktur dan stratifikasi sosial dalam masyarakat dan terutama terhadap hubungan antara pendatang dan penduduk asli.

### **2. Komponen Kependudukan**

- a. Jumlah Penduduk, dengan asumsi semakin besar jumlah penduduk dan semakin banyak diferensiasi kerja yang ada di suatu lokasi kegiatan pembangunan, semakin kecil intensitas dampak sosial yang diperkirakan, karena proyek dapat menggunakan tenaga kerja setempat.
- b. Kepadatan penduduk dan komposisi penduduk di lokasi, untuk memperkirakan besaran dampak, stress ataupun konflik, dari kegiatan pembangunan yang direncanakan.
- c. Jarak lokasi dari pusat daerah atau kota metropolitan, dengan asumsi bahwa kota besar lebih mudah dapat menyerap dampak sosial suatu kegiatan.

- d. Keanekaragaman penduduk di lokasi, dengan asumsi bahwa semakin beraneka ragam penduduk di suatu lokasi, semakin menjadi kurang menyolok kehadiran pendatang, karenanya perbedaan pendatang dan penduduk asli berkurang. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa semakin beranekaragam semakin tinggi toleransi pada perubahan.
- e. Pola perubahan penduduk, untuk memperkirakan tenaga kerja yang tersedia bagi kegiatan pembangunan yang direncanakan.

### 3. *Komponen Ekonomi*

- a. Perubahan Pendapatan, yang akan menyebabkan perubahan daya beli penduduk sehingga merubah cara hidup sehari-hari.
- b. Daya serap dan komposisi tenaga kerja diberbagai sektor ekonomi, yang mempengaruhi struktur stratifikasi serta kehidupan masyarakat setempat.
- c. Perpajakan, yang menentukan gaya hidup sehari-hari dari masyarakat dan perubahan karena kegiatan pembangunan pada sistem atau pelaksanaan perpajakan akan membawa dampak sosial
- d. Pola kegiatan di setiap sektor ekonomi, yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, dan mempengaruhi keadaan sosial dari masyarakat tersebut.

Berdasarkan komponen-komponen tersebut, maka Andal Sosial bersifat kompleks, sehingga memerlukan integrasi analisis dari beraneka ragam disiplin, analisis perlu dilakukan oleh tim bukan perorangan, dengan sifat analisis “*interdisipliner*”, “*multidisipliner*”, atau “*cross disipliner*”.

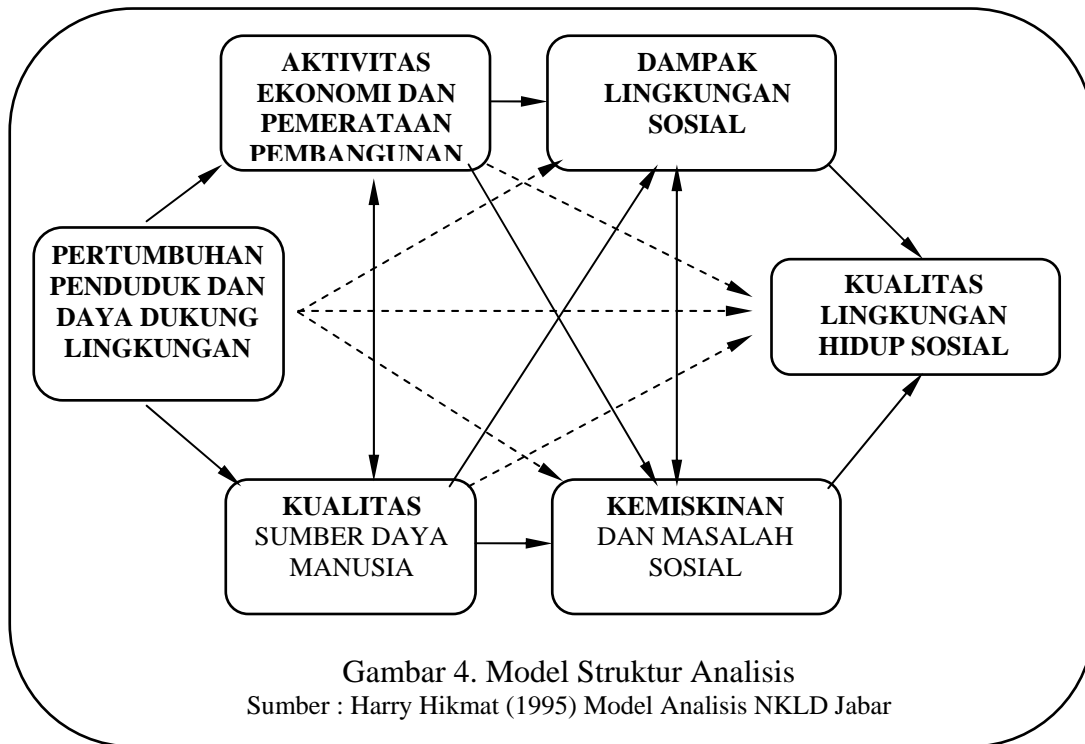
Tahapan studi Andal Sosial serupa namun tidak perlu sama dengan tahapan yang ditemui dalam analisis dampak lingkungan biogeofisik. Umumnya ada 4 tahapan utama yang dilakukan :

- a. *Penyajian informasi lingkungan sosial (PIL)*, memberikan informasi mengenai keadaan lingkungan sosial sebelum kegiatan yang direncanakan dilakukan, kecenderungan dan masalah yang ada di dalam masyarakat tersebut.
- b. *Proyeksi* mengenai perubahan yang mungkin terjadi dengan memperhatikan distribusi dari perubahan yang diperkirakan dalam masyarakat.
- c. *Penilaian (assessment)*, melakukan penilaian mengenai besaran dan pentingnya dampak yang diperkirakan.
- d. *Evaluasi*, melakukan penilaian mengenai kemungkinan diterima dan diabsorpsinya dampak perubahan oleh masyarakat setempat.

### *Kualitas Lingkungan Hidup Sosial*

Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pokok yang dihadapi setiap usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah pembangunan selayaknya diikuti dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup sosial dan berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta dapat teratasinya depresiasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proses pembangunan. Karena itu keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan yang

berwawasan lingkungan perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris dan objektif. Kerangka pikir analisis dapat dilihat pada Gambar 4.



Perlunya menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan hidup sosial pada nasional maupun tingkat regional (analisis spasial), didasarkan atas pertanyaan yang mendasar : “Apakah pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, cenderung memperbaiki, memperburuk atau tidak memberi pengaruh yang berarti atas kualitas sumber daya manusia, masalah kemiskinan, dampak lingkungan sosial dan kualitas hidup sosial?”.

Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pokok yang dihadapi setiap usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah pembangunan selayaknya diikuti dengan meningkatnya kualitas hidup dan berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris dan objektif.

Gore (1984) mengemukakan bahwa ada tiga masalah kebijakan yang umum terjadi di negara-negara berkembang, yaitu: (1) ketimpangan regional dalam pembangunan; (2) pesatnya perkembangan ibukota negara; dan (3) kesenjangan kota dan desa. Karena itu, tujuan pembangunan regional, diarahkan untuk mengatasi kesenjangan antar regional dan antar desa dan kota, serta menahan pertumbuhan ibukota negara. Untuk itu, berbagai indikator dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan regional dan kesenjangan desa - kota, seperti : pendapatan per kapita, kesempatan kerja, fasilitas sosial atau infrastruktur. Asumsi yang digunakan yaitu pola spasial adalah fakta sosial dan masalah ekonomi. Dengan demikian hubungan antara ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup sosial dalam konteks spasial di suatu wilayah,

berkaitan dengan pandangan tentang adanya hubungan antara permasalahan ekonomi dengan fakta sosial yang dicerminkan melalui pola-pola spasial.

Dalam konteks pembangunan, indikator kemajuan pembangunan yang umum digunakan yaitu indikator-indikator ekonomi, seperti : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), GNP/ PNB per kapita, inflasi, dan sebagainya. Penyempurnaan penggunaan indikator ekonomi, seperti GNP/ PNB per kapita sebagai ukuran pembangunan, yaitu ditambahkan dengan indikator yang menggambarkan pemerataan pembagian pendapatan dan tingkat ketimpangan sebaran pendapatan. Jika didasarkan atas indikator-indikator ekonomi, dapat diketahui seberapa jauh pertumbuhan ekonomi yang pesat di suatu wilayah pembangunan diikuti semakin tingginya pemerataan pembangunan yang dilihat dari pemerataan pembagian pendapatan maupun semakin rendahnya tingkat ketimpangan sebaran pendapatan.

Dengan semakin berkembangnya indikator-indikator pembangunan sosial, yang lebih menekankan kepada aspek kualitas hidup manusia, maka banyak kritik ditujukan kepada indikator-indikator ekonomi tersebut diatas. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penelitian yang menunjukkan adanya inkonsistensi antara hasil pembangunan yang dicapai menurut indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita; dengan penurunan jumlah penduduk miskin atau peningkatan kualitas hidup penduduk.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Birdsall, Nancy. 1993. *Social Development is Economic Development, The Policy Research Working Paper Number 1123*. Washington : World Bank.
- Cox, David. 1995. *Social Development Personnel A Vital Missing Link In Development Work*. New York : John Wiley dan Sons Limited.
- Emil Salim. 1990. *Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kantor Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
- Emil Salim. 1993. *Analisis Kebijakan Ekonomi yang Berkelanjutan*. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*. Edisi Keempat. Jakarta : EMDI project.
- Emil Salim. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- Ghai, D., Hopkins, M. dan McGranahan. 1988. *Some Reflections on Human and Social Indicators for Development*. UNRISD.
- Gore, Charles. 1984. *Regions in Question : Space, Development Theory and Regional Policy*. London : Methuen dan Co. Ltd.
- Gunarwan Suratmo, 1991, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, UGM, Yogyakarta.
- Gustav Ranis. 1977. *Trade-offs or Complements (dalam Economic Development, Poverty, and income Distribution)*.

- Hardiman, M dan Midgley, J. 1982. *The Social Dimensions of Development : Social Policy and Planning in the Third World*. New York : John Wiley dan Sons Limited.
- Harry Hikmat. 1995. *Paradigma Pembangunan dan Implikasi dalam Perencanaan Sosial*. (tidak dipublikasikan). Jakarta : Universitas Indonesia.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. 1995. *Pedoman Umum Penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD)*. Jakarta.
- Korten, D.C. 1993. *Menuju Abad ke-21 : Tindakan Sukarela dan Agenda Global Forum Pembangunan Berpusat-Rakyat*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.
- Korten, D.C. dan Sjahrir. (ed.). 1993. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.
- Korten, D.C. dan Klauss, R. (ed.) 1984. *People Centered Development : Contributions toward Theory and Planning Frameworks*. Kumarian Press.
- Riga A.S. 1990. *Memperkirakan dan Mencegah Dampak Pembangunan terhadap Lingkungan Sosial*. Bandung : PPLH-ITB.
- Soerjani, M. 1992. *Ekologi Sebagai Dasar Pemahaman tentang Lingkungan Hidup*. Serasi No. 24.
- Surna T.D. 1993. *Pengembangan Informasi Geografis dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan*. Serasi Nomor 27.
- Surna. T.D. dan Harry H. A. 1992. *Kualitas Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kantor Menteri Lingkungan Hidup.
- Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi keempat. Jilid 1. Jakarta : Erlangga.
- United Nations. 1972. *Planning as A Tool of Development (dalam Corespondence Course in Social Planning)*. Lecture 2.
- Weaver, J.H., Jameson, K.P dan Blue, R.N. 1990. *Growth and Equity : Can They Be Happy Together? Analysis of seven models and their critics*.

